

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 1998, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KUHAP*, PT. Deltacitra Grafindo, Jakarta.
- _____, 2011, *KUHAP dalam Prospektif*, Diadit Media, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1992, *Pemikiran Rencana Undang-Undang Kejaksaan*, Tri Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Azhari, Aidul Fitriciade, 2017, "Korelasi Budaya Hukum dan Gagasan Negara Hukum di Indonesia", *Korelasi Budaya Hukum dan Gagasan Negara Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan I, Gramata Publishing, Jakarta.
- _____, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Perspektif Pembaharuan Hukum, teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basuki, Wishnu, 2011, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2001, *American Law: An Introduction, second edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Gurnarto, Marcus Priyo dan Wahyu Sudrajat, 2018, *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi dan RM. Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.

_____, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Hatta, Mohammad, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*, Galangpress, Yogyakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Hitam, Musa Bin, tanpa tahun, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Krelinger, Fred. N, 1996, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Logman, Loebby, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta.

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2, Cet. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi), Cetakan kelima*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung.
- Nawawi, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pangaribuan, Aristo M. A. et.al, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2008, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidna di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bale Bandung, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, edisi Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Mahmuji et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta,

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

_____, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suriasumantri, Jujun S, 1999, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tresna, R, 1977, *Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad. Cet-2*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wahid, Abdul, et. Al, 1999, *Penerapan hak Tolak Wartawan Dalam Peradilan Delik Pers*, Tarsito, Bandung.

Walker, Clive dan Keir Stramer, 1993, *Miscarriage of Justice: A Review of Justice in Error*, Blackstone Press Limited, London.

Wresniwiro, M, 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana., Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258.

Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Nomor 52 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung R.I., Kapolri, dan Kepala BNN Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14. PW.0703 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SEMA/17 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang Biaya Perkara Pidana.

Surat Jaksa Agung RI tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat Nomor B-029/E/EJP/03/2019.

Surat Edaran Dirjen Badilum No. 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi

C. Jurnal / Makalah / Naskah Pidato / Laporan

Soebekti, 1979, "*Sistem hukum Nasional Yang Akan Datang*," *Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono, 1993, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Barama, Michael, 2016, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III/No.8.

Dofir, Muhammad, 2018, "Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dan Problematikanya," Materi Paparan

dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono, 2007, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum) Melawan Kejahatan", dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018.

Laporan Tahunan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, 2018, dan tahun 2019.

D. Tesis/Skripsi

Dekka, Ela, 2018, "Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat," *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pratomo, Yoga, 2018, "Analisis Tuntutan Pidana Penuntut Umum Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ibrahim Malik Tanjung, 2015, "Analisis Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika dalam Proses Peradilan", *Tesis*, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Penanggulangan Narkoba, Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sihotang, Daniel Tulus M. Sihotang, 2014, "Lembaga *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Tesis*, Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tumpal Eben Ezer, 2013, "Penerapan Rehabilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika," *Tesis*, Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

F, Siti Natasha, 2019, "Penyelesaian Perkara Pidana yang Diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Singkat di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Yogyakarta.

E. Internet

Society, Constitution, “Habeas Corpus Act 1679”,
<https://www.constitution.org/eng/habcorpa.htm>, diakses tanggal 20
Februari 2020.

Society, Constitution, “Magna Charta (The Great Charter)”,
<https://www.constitution.org/eng/magnacar.htm>, diakses tanggal 19
Februari 2020.

Kementerian Federasi Kehakiman dan Perlindungan Konsumen Jerman
(*Bundesministerium Der Justiz und fur Verbraucherschutz*), “Code of
Civil Procedure (*Zivilprozessordnung*, ZPO)”, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p0561, diakses tanggal 20
februari 2020.

Kementerian Federasi Kehakiman dan Perlindungan Konsumen Jerman
(*Bundesministerium Der Justiz und fur Verbraucherschutz*), “Code of
Criminal Procedure (*Strafprozeßordnung*, StPO)”, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/, diakses tanggal 20 februari 2020

Dewan Perwakilan Rakyat, “Program Legislasi Nasional Prioritas”,
<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada 25 Maret 2020.

Deflem, Mathieu, “Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition”,
www.cambridge.org/9780521857253, diakses 22 Februari 2020.

Anonim, 2012 “Rancangan undang-Undang Republik Indonesia Nomor.....
Tahun.... Tentang Hukum Acara Pidana”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/RUU/2009/RUUKUHAPJan%202009.pdf>, diakses pada 2
Maret 2020.

Supreme Court of Japan, 2019 “Outline of Criminal Justice in Japan”,
[https://www.courts.go.jp/english/vcfiles/courtsen/file/Outline_of_Crimina
l_Justice_in_JAPAN_2019.pdf](https://www.courts.go.jp/english/vcfiles/courtsen/file/Outline_of_Criminal_Justice_in_JAPAN_2019.pdf), diakses 25 Maret 2020.

Kementerian Kehakiman Jepang, “Japan Court Act No. 59 of April 16, 1947”,
Chapter IV, [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?
re=&vm=2&id=1894](http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=1894), diakses pada 18 Maret 2020.

Japan Federation of Bar Associations (JFBA), “The Japanese Judicial System”,
[https://www.nichibenren.or.jp/en/about/judicial_system/judicial_system.
html](https://www.nichibenren.or.jp/en/about/judicial_system/judicial_system.html), diakses pada 20 Februari 2020.

Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Legislation Department
2006 & Section for European and International Affairs, “The Criminal
Procedure Act No. 25, May 1981 with subsequent amendments, the latest

made by Act of 21 June 2013 No. 84 (*Straffeprosessloven* 1981),” section 233, <https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19810522-025-eng.pdf>, diakses pada 3 April 2020.

Norwegian Ministry of Justice and Public Security, “The General Civil Penal Code Act No. 10, May 1902 with subsequent amendments, the latest made by Act no. 131, December 2005. (*Straffeloven* 1902),” <https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf>, diakses tanggal 3 April 2020.

Kementerian Federasi Kehakiman dan Perlindungan Konsumen Jerman (*Bundesministerium Der Justiz und für Verbraucherschutz*), “German Narcotic Drugs Act (*Betäubungsmittelgesetz*”, *BtMG*)”, Chapter VI. https://www.bfarm.de/EN/FederalOpiumAgency/NarcoticDrugs/_node.html#:~:text=Narcotic%20drugs%20, diakses pada 14 Maret 2020.

Brent E. Turvey, Craig M. Cooley, 2014, “Miscarriage of Justice: Actual Innocence, Forensic Evidence, and The Law”, Chapter 10, Academic Elsevier Inc, USA, https://www.researchgate.net/publication/291291984_Miscarriages_of_Justice_Actual_Innocence_Forensic_Evidence_and_the_Law, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

MaPPI FHUI, 2016, “Permasalahan Nasional dan Tahunan Anggaran Perkara Kejaksaan”, <http://mappifhui.org/2016/05/10/permasalahan-nasional-dan-tahunan-anggaran-perkara-kejaksaan/>, diakses pada 25 Mei 2020.

Radar online, “Jaksa Theodora Sidang Kilat, Hakim Marbun Ok Punya”, <https://radaronline.id/2020/01/27/jaksa-theodora-sidang-kilat-hakim-marbun-ok-punya/>, diakses pada 9 Mei 2020.

Institut Kriminologi Australia, Pemerintah Australia, “Research and Public Policy Series No. 74: Criminal Trial Delays in Australia: Trial Listing Outcomes”, <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/rpp074.pdf>, diakses pada 20 Mei 2020.

Fred Shapiro, “You Can Quote Them: Justice Delayed is Justice Denied”, <https://yalealumnimagazine.com/articles/2967-you-can-quote-them>, diakses pada 14 Juli 2020.

Satjipto Rahardjo, Kediktatoran Pengadilan, Kompas, 23 April 2001 sebagaimana dikutip dalam Ariehta Eleison Sembiring, “Kekaguman dan Kritik Atas Pemikiran Satjipto Rahardjo”, https://www.researchgate.net/publication/340526827_Kekaguman_dan_Kritik_atas_Pemikiran_Satjipto_Rahardjo, diakses pada 14 Juli 2020.